

ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE PAYAKUMBUH CITY GOVERNMENT FOR THE 2021–2025 PERIOD**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021-2025**

Siska Yulia Defitri¹, Juita Syukraini², Hielda Indriani Putri³, Regianta Audri Wulandari⁴, Nur Aliffa Putri M⁵, Trisya Arsyabil⁶

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin^{1,2,3,4,5,6}

siskayd023@gmail.com, jjita.sukraini@gmail.com, hielda.indriani1@gmail.com,

regianta.audri13@gmail.com, alifamesra@gmail.com, arsyabiltrisya@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Payakumbuh City Government through the financial independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) during the 2021–2025 period. The study employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA) of Payakumbuh City. The analysis was conducted by comparing the results of the financial ratio calculations with the applicable assessment criteria. The results show that the average regional financial independence ratio of Payakumbuh City was 22.64%, which falls into the very low category with an instructive relationship pattern. This indicates that the region's ability to finance government administration and development activities remains highly dependent on transfer funds from the central and provincial governments. Meanwhile, the average PAD effectiveness ratio was 107.67%, which falls into the very effective category, indicating that the realization of PAD consistently exceeded the established targets. Furthermore, the average PAD efficiency ratio was 4.67%, which falls into the very efficient category, indicating that the costs incurred to generate PAD were relatively small compared with the revenue successfully realized. Based on the findings, it can be concluded that the performance of PAD management by the Payakumbuh City Government was very good in terms of effectiveness and efficiency. However, the level of regional financial independence remains low; therefore, efforts to optimize PAD sources are necessary to reduce dependence on transfer funds and improve the region's capacity to finance its expenditures independently.

Keywords: *Regional Financial Performance; Financial Independence Ratio; Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Local Own-Source Revenue (PAD); Payakumbuh City.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Payakumbuh. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan dengan kriteria penilaian yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh sebesar 22,64%, yang termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di sisi lain, rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 107,67%, yang termasuk kategori sangat efektif, menunjukkan bahwa realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, rata-rata rasio efisiensi PAD sebesar 4,67%, yang termasuk kategori sangat efisien, mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan PAD Pemerintah Kota Payakumbuh tergolong sangat baik dari aspek efektivitas dan efisiensi. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah sehingga diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD guna

mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah secara mandiri.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Rasio Kemandirian; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kota Payakumbuh.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya menggunakan rasio keuangan daerah. Menurut Adi (2017), rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui sumber pendapatan daerah sendiri. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran secara ekonomis dan tepat guna.

Pemilihan ketiga rasio tersebut didasarkan pada kondisi keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Zuripal, (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Payakumbuh masih tergolong rendah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pencapaian target PAD dan pengelolaan belanja daerah juga perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD dapat dilihat melalui rasio efektivitas. Tingkat efektivitas yang rendah menunjukkan bahwa target pendapatan yang telah ditetapkan belum dapat direalisasikan secara optimal. Di sisi lain, rasio efisiensi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, penggunaan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara bersama-sama dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kinerja keuangan pemerintah daerah. Zuripal, (2023) menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh sebelum dan sesudah implementasi transaksi nontunai. Deswita et al., (2024) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh. Selanjutnya, Desanty et al., (2025) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh. Selain itu, Remanta et al., (2024) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah, penelitian yang menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara bersamaan pada periode 2021–2025 masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah atau evaluasi kebijakan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi selama periode 2021–2025.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada tahun 2021–2025.

2. METODE

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam suatu organisasi. Teori ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat menimbulkan konflik sehingga diperlukan suatu kontrak atau kesepakatan yang jelas untuk mengurangi terjadinya masalah tersebut.

Ramadona (2016) menjelaskan bahwa teori keagenan berkaitan dengan hubungan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Scott, (2015) menyatakan bahwa teori agensi merupakan suatu kontrak antara principal dan agent, di mana agent diberikan wewenang untuk menjalankan tugas atas nama principal. Selanjutnya, Supriyono, (2018) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan hubungan kontraktual yang melibatkan principal dan agent. Supriyono juga menjelaskan bahwa hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik akibat adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Adi, (2017), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan beberapa indikator, seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur pengelolaan keuangan negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Melalui laporan keuangan yang disusun dan diaudit, pemerintah dapat menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Fahmi, (2012), kinerja keuangan merupakan hasil analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan kegiatan keuangannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini penting karena dapat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Mardiasmo, (2009) rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan yang berasal dari luar daerah, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat otonomi dan kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.

Supriyono (2010), rasio efektivitas memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, rasio efektivitas menjadi salah satu alat evaluasi yang penting dalam menilai keberhasilan kebijakan dan program pemerintah daerah.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh.

Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit.

Mardiasmo, (2009) menjelaskan bahwa rasio efisiensi merupakan indikator penting untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang dimiliki. Melalui pengukuran efisiensi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

METODE, DATA DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan gambaran mengenai kondisi yang diteliti tanpa melakukan pengujian hubungan maupun pengaruh antarvariabel.

Sugiyono (2019), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, keadaan, maupun objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh. Metode ini membantu peneliti dalam memahami karakteristik suatu objek penelitian secara lebih jelas dan terperinci.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari dokumen atau informasi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan belanja daerah selama periode 2021–2025. Data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta dokumen publikasi resmi yang tersedia pada website Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sumber data penelitian diperoleh melalui website resmi Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu <https://bkd.payakumbuhkota.go.id/> serta publikasi laporan keuangan daerah yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Analisis rasio kemandirian dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data PAD serta pendapatan transfer selama periode penelitian. Rasio kemandirian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan transfer Pusat/Pinjaman}} \times 100\%$$

Menentukan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Pola dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25 %	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber:Depdagri (1997), Kepmendagri No.690.900.327/1969.

Analisis Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data target serta realisasi PAD selama periode penelitian. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan. Rasio efektivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggran PAD}} \times 100\%$$

Berikut kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektifitas PAD

Persentase (%)	Tingkat Efektifitas
100-Keatas	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber:Depdagri (1997), Kepmendagri No.690.900.327/1969.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Analisis rasio efisiensi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data realisasi belanja daerah serta realisasi pendapatan daerah selama periode penelitian. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang dan Jasa}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Berikut Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efisiensi

Persentase (%)	Tingkat Efektifitas
Dibawah 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
100 Keatas	Tidak Efisien

Sumber:Depdagri (1997), Kepmendagri No.690.900.327/1969.

3. HASIL

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah sekitar 80,43 km² dan terdiri atas 5 kecamatan serta 47 kelurahan yang masing-masing berada di bawah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Rasio Kemandirian Kota Payakumbuh

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer. Total pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer di Kota Payakumbuh 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Transfer di Kota Payakumbuh

Tahun	PAD	Transfer
2021	107.757.183.602	584.976.212.293
2022	126.962.402.643	576.910.401.986
2023	123.216.492.558	616.393.409.345
2024	138.649.853.624	613.134.671.289
2025	166.878.567.156	611.557.713.708

Sumber: Data Diolah, 2026

Perhitungan Rasio Kemandirian

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui rasio kemandirian, kemampuan keuangan dan pola hubungan di Kota Payakumbuh pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2021	18,42%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	22,01%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	19,99%	Rendah Sekali	Instruktif
2024	22,61%	Rendah Sekali	Instruktif
2025	27,29%	Rendah	Konsultatif
Rata-rata Rasio		22,64%	

Sumber: Data Diolah, 2026

Dari tabel 5, diatas dapat dilihat Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh selama tahun 2021–2025 memiliki rata-rata sebesar 22,64%, yang termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Meskipun pada tahun 2025 rasio kemandirian meningkat menjadi 27,29% sehingga masuk kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan Kota Payakumbuh masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2. Rasio Efektifitas Kota Payakumbuh

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Total realisasi pendapatan dibagi dengan pendapatan yang dianggarkan di Kota Payakumbuh 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan di Kota Payakumbuh

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggran Pendapatan
2021	107.757.183.602	116.000.000.000
2022	126.962.402.643	117.000.000.000
2023	123.216.492.558	112.000.000.000
2024	138.649.853.624	130.174.080.614
2025	166.878.567.156	157.990.952.046

Sumber: Data Diolah, 2026

Perhitungan Rasio Efektifitas

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui rasio efektifitas, dan kriteria keuangan di Kota Payakumbuh pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria
2021	107,65%	Sangat Efektif
2022	108,51%	Sangat Efektif
2023	110,01%	Sangat Efektif
2024	106,51%	Sangat Efektif
2025	105,63%	Sangat Efektif
Rata-rata Rasio	107,67%	

Sumber: Data Diolah, 2026

Dari tabel 7, dapat dilihat Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama tahun 2021–2025 memiliki rata-rata sebesar 107,67%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD setiap tahun selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 110,01%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2025 sebesar 105,63%. Meskipun mengalami fluktuasi, seluruh nilai rasio berada di atas 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan target PAD dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif.

3. Rasio Efisiensi Kota Payakumbuh

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 8. Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan di Kota Payakumbuh

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan PAD
2021	579.733.649.379	107.757.183.602
2022	660.004.493.744	126.962.402.643
2023	616.082.698.042	123.216.492.558
2024	530.202.590.065	138.649.853.624
2025	648.623.780.663	166.878.567.156

Sumber: Data Diolah, 2026

Perhitungan Rasio Efisiensi

Berdasarkan tabel 8, data realisasi belanja dan realisasi penerimaan PAD dapat diketahui rasio efisiensi di kota payakumbuh, sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria
2021	5,38%	Sangat Efisien
2022	5,20%	Sangat Efisien
2023	5,00%	Sangat Efisien
2024	3,82%	Sangat Efisien
2025	3,89%	Sangat Efisien
Rata-rata Rasio	4,67%	

Sumber: Data Diolah, 2026

Dari tabel 9, dapat dilihat Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama tahun 2021–2025 memiliki rata-rata sebesar 4,67%, yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD relatif sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Rasio efisiensi mengalami penurunan dari 5,38% pada tahun 2021 menjadi 3,89% pada tahun 2025, yang mengindikasikan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan seluruh rasio berada jauh di bawah 10%, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah mampu mengelola biaya pemungutan PAD secara sangat efisien sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat diperoleh dengan pengeluaran yang minimal.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh selama periode 2021–2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 107,67% yang berada dalam kategori sangat efektif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, rasio efisiensi PAD juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata sebesar 4,67%, yang termasuk kategori sangat efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mampu mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio kemandirian sebesar 22,64% yang termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan

pembangunan yang bersumber dari PAD masih terbatas sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih cukup tinggi. Walaupun pada tahun 2025 rasio kemandirian meningkat menjadi 27,29% dan masuk kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, peningkatan tersebut belum mampu mengubah tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu terus mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah agar kemampuan pembiayaan daerah secara mandiri dapat semakin meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah berjalan dengan sangat baik pada aspek efektivitas dan efisiensi. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata rasio efektivitas sebesar 107,67% yang termasuk kategori sangat efektif, serta rata-rata rasio efisiensi sebesar 4,67% yang termasuk kategori sangat efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan dengan biaya pemungutan yang relatif rendah.

Namun demikian, dari sisi kemandirian keuangan daerah, Kota Payakumbuh masih berada pada kategori rendah sekali dengan rata-rata rasio sebesar 22,64% dan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pemerintahan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2025, tingkat kemandirian tersebut belum cukup untuk menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat terus berkurang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. W. (2017). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015.
- Desanty, R., Putri, A., & Manajemen, M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pemerintah Kota Payakumbuh tahun. 3, 1033–1050.
- Fahmi. (2012). Analisis Kinerja Keuangan.
- Deswita, R., Ariany, R., Teknologi, I., Agus, H., & Bukittinggi, S. (2024). PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH. 7(3), 1303–1316.
- Remanta, O., Ramadhan, P. R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN) Volume 05 Nomor 04 Tahun 2024. 05, 457–465.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik.
- Scott. (2015). Financial Accounting Theory.
- Supriyono. (2018). Akuntansi Keperilakuan.
- Zuripal2), S. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. 381–394.